

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN INGGRIS KELUAR DARI UNI EROPA**

Dalam bab II ini, penulis mencoba menjelaskan terkait dengan proses pembuatan kebijakan Inggris dalam sistem pemerintahannya, termasuk bagaimana prosedur keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa dan Kebijakan apa saja yang dirancang pasca Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa.

Sejak awal keanggotaan Inggris terhadap Uni Eropa, Inggris mengalami dua kendala berat dalam proses keanggotaannya, yang pertama adalah aksesi yang terlambat pada tahun 1973 dan untuk tidak menjadi anggota pendiri di tahun 1950 serta hak veto yang dilakukan oleh Jenderal de-Gaulle pada tahun 1960. Pada tahun 1951 setelah ditandatanganinya *Treaty of Paris*, Perdana Menteri Belgia Paul Henri Spaak melihat potensi *European Coal and Steel Community* di masa yang akan datang, kemudian Paul Henri Spaak mengusulkan diciptakannya *Common Market*, sebagai bentuk integrasi yang lebih besar daripada *European Coal and Steel Community*. Usulan Spaak menjadi dasar dari perjanjian Roma terkait pembentukan masyarakat ekonomi di Eropa dan ditandatangani pada bulan Maret 1957. (Jones, 2007).

Referendum Inggris tidak hanya digelar sesekali saja, akan tetapi Inggris berhasil menggelar Referendum sudah kedua kalinya dan dalam rentang kurun waktu yang cukup lama. Referendum merupakan suatu proses pemungutan suara

untuk mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan politik yang memengaruhi suatu negara secara keseluruhan, misalnya seperti adopsi atau amendemen konstitusi atau undang-undang baru, atau perubahan wilayah suatu negara.

Dalam sebuah referendum, masyarakat yang memiliki hak pilih dimintai pendapatnya. Hasil referendum bisa dianggap mengikat atau tidak mengikat. Sebuah referendum dianggap mengikat apabila pemerintah harus mengikuti seluruh jawaban rakyat yang ada dalam hasil referendum. Apabila referendum tidak mengikat, berarti referendum itu hanya digunakan sebagai fungsi penasihat. Sebuah hasil referendum merupakan suatu bahan dalam pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya oleh suatu negara

#### **A. Konstitusi Pembuatan Kebijakan Inggris**

Inggris merupakan negara yang demokratis, dibawah kekuasaan sebuah parlemen. Dalam setiap masa pemerintahan parlemen (rezim), parlemen harus membuat sebuah program kebijakan yang baru. Kebijakan tersebut harus sesuai dengan keinginan semua pihak. Dalam masa-masa kepemimpinan parlemen ini, setidaknya haruslah dibuat beberapa program kebijakan baru yang tidak lebih dari 20 program kebijakan. Dari beragam masalah yang timbul haruslah dipilih dan diprioritaskan salah satu sebelum pada akhirnya rancangan program kebijakan tersebut menjadi sebuah kebijakan yang nyata dan siap untuk diimplementasikan ke publik.

Konstitusi Inggris mempunyai enam karakter, enam karakter tersebut antara lain:

1. Tidak terkodifikasi yakni tidak ada satu dokumenpun di Inggris yang mengandung semua aturan penting yang berkaitan dengan pemerintahan. Untuk menentukan posisi konstitusional dari suatu masalah di Inggris, seseorang harus merujuk kepada lima sumber, lima sumber tersebut yakni: Undang-Undang Parlemen, keputusan pengadilan, hukum yang berlaku yang memiliki prinsip tertentu, hukum dan kebiasaan parlemen dan konvensi konstitusi
2. Luwes yakni semua undang-undang memperoleh perlakuan yang sederajat dan sama mulai dari hukum yang mengatur pergantian kekuasaan, dan lain sebagainya
3. Parlemen merupakan kekuasaan tertinggi di seluruh Inggris Raya, tidak diperbolehkan adanya pemerintah lokal yang mempunyai status yang sederajat dengan parlemen
4. Parlemen adalah Penguasa tertinggi dalam organ kekuasaan
5. Adanya pemisahan kekuasaan, yakni parlemen tidak campur tangan dalam tugas yudikatif dan eksekutif
6. Adanya sistem kabinet, yakni adanya debat atau konferensi antara Perdana Menteri dan anggota *House of Common* yang sebagian besar anggota kelompok oposisi di pihak lain (Drs. Harwanto Dahlan, 1993, hal. 5)

Masalah yang masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi dibicarakan dan dicari pemecahan terbaik. Perumusan kebijakan adalah bagaimana suatu negara mempunyai masing-masing tahap pengusulan rumusan kebijakan dari berbagai macam inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan, seperti melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintahan, presiden, dan juga lembaga legislatif.

Kewajiban ikut serta dalam merumuskan sebuah kebijakan dalam Inggris Raya meliputi Perdana Menteri, Kelompok kepentingan dalam kabinet dan sipil. Perdana Menteri adalah kepala pemerintah Inggris. Mereka bertanggung jawab untuk semua kebijakan dan keputusan. Mereka mengawasi pengoperasian Layanan Sipil dan instansi pemerintah menunjuk anggota pemerintah adalah tokoh pemerintah utama di *House of Commons*. Kelompok kepentingan terdiri dari anggota pemerintah senior. Setiap minggu selama Parlemen, anggota Kabinet (Sekretaris Negara dari semua departemen dan beberapa menteri lainnya) bertemu untuk membahas isu-isu yang paling penting bagi pemerintah. (Government B. )

## **B. Prosedur Keluarnya Inggris Dari Keanggotaan Uni Eropa**

Brexit atau *Britania Exit* merupakan sebuah indikator Inggris keluar dari Uni Eropa. Bergulirnya Brexit memicu dilaksanakan referendum keanggotaan Inggris pada Uni Eropa. Referendum Inggris telah digelar sebanyak dua kali. Untuk pertama kalinya referendum yang digelar setelah tiga tahun keanggotaan

pada tahun 1975 menyatakan untuk tetap berada pada keanggotaan Uni Eropa, sementara itu selang beberapa waktu kemudian Inggris Raya mengevaluasi kembali apa yang didapatkan dari Uni Eropa maka Inggris memutuskan untuk menggelar referendum kedua kalinya pada tanggal 23 Juni 2016 bertempat di Britania Raya dan Gibraltor.

Dalam sejarah Uni Eropa, belum pernah terdapat negara yang berdaulat hengkang dari Uni Eropa maupun Organisasi pendahulunya. Akan tetapi, sejauh ini terdapat tiga wilayah negara anggota UE sudah keluar. Negara tersebut antara lain Aljazair (tahun 1962 merdeka dari Perancis), Greenland (tahun 1985) dan Saint Barthelemy (tahun 2012), dua wilayah terakhir menjadi Negara dan Wilayah seberang Laut Uni Eropa. Keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa dinilai sangat riskan dalam pandangan dunia Internasional. Keluarnya Inggris juga tidak dapat langsung sepenuhnya lepas dari Uni Eropa, akan tetapi masih dibutuhkan proses yang lama serta panjang dalam sistematis prosedur pada artikel 50 perjanjian Lisbon tahun 2009. Artikel 50 perjanjian Lisbon akan memberi waktu Inggris dua tahun untuk bernegosiasi dengan keputusan mereka.

Dalam perjanjian tersebut pada tahun 2009 artikel 50 menguraikan bagaimana proses penarikan negara akan bekerja serta secara implisit menguraikan mengenai mengapa negara meninggalkan keanggotaan. Perdana Menteri David Cameron dan pemimpin pro-Brexit secara terbuka menyatakan bahwa apabila hasil referendum Inggris di tahun 2016 menyatakan tetap meninggalkan Uni Eropa, maka kedua tokoh tersebut juga akan berusaha untuk terus mengusahakan artikel 50.

Sedangkan, apabila Inggris menginginkan proses yang tidak cukup lama, maka Inggris dapat memutuskan untuk menggunakan jalur tak resmi (Bilateral) Perdana Menteri May sempat memberikan komentar bahwa pihaknya akan coba menempuh jalur bilateral berupa pendekatan langsung dengan setiap pimpinan Eropa. Ada indikasi bahwa proses ini akan terlebih dahulu dilakukan sepanjang 2016 ini (future, 2016).

Setelah digelar Referendum yang pada referendum terakhir menyatakan keluar dari keanggotaan Uni Eropa maka dimulailah masa transisi selama maksimal dua tahun, di mana Inggris pun harus mengajukan Artikel 50 yang termuat dalam Perjanjian Uni Eropa, kemudian 27 negara anggota Uni Eropa bertemu untuk mendiskusikan pencabutan Inggris dari keanggotaan. Artikel 50 memungkinkan pemerintah negara anggota untuk mengajukan keluar dari Uni Eropa. Setelah itu, dimulai perundingan antara negara yang akan meninggalkan dengan negara-negara anggota Uni Eropa yang lainnya. Setelah Inggris mengajukan Artikel 50 dan negara-negara anggota lainnya melakukan perundingan, maka masuklah periode negosiasi antara Inggris dengan Uni Eropa. Kemudian, draf perjanjian diajukan kepada Konsil Eropa yang terdiri dari 27 pimpinan negara-negara anggota Uni Eropa. Perjanjian tersebut membutuhkan persetujuan setidaknya dari 20 negara anggota dengan 65 persen populasi. Setelah itu, dilakukan ratifikasi oleh Parlemen Eropa.

Pada akhir masa transisi selama 2 tahun tersebut, negosiasi masih bisa diperpanjang hanya apabila 27 negara anggota Uni Eropa menyetujuinya. Jika tidak ada persetujuan untuk memperpanjang negosiasi, maka Perjanjian Uni Eropa

tidak lagi berlaku bagi Inggris. Artinya, resmilah Inggris meninggalkan Uni Eropa. Adapun Parlemen Inggris harus mencabut Undang-undang Masyarakat Eropa Tahun 1972 dan menggantinya dengan perjanjian serta undang-undang baru. Inggris pun bisa berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali menjadi anggota Uni Eropa. Akan tetapi, apabila ingin kembali menjadi anggota, maka Inggris harus mendaftar seperti negara-negara lainnya (Setiawan, 2016)

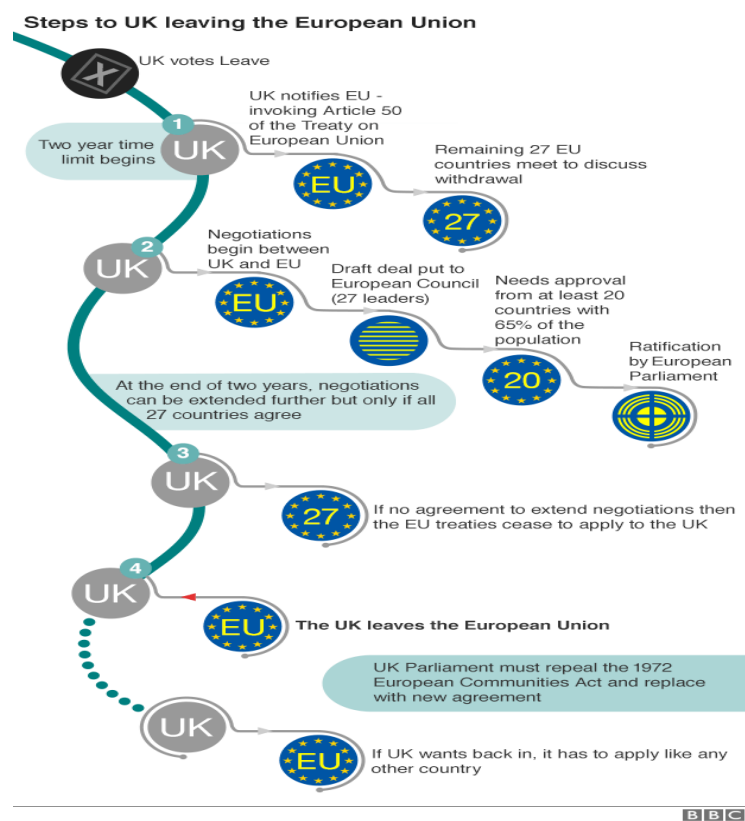
Pasal 49A Perjanjian Lisbon, berlaku tanggal 1 Desember 2009, untuk pertama kalinya mencantumkan prosedur pencabutan keanggotaan secara sukarela dari Uni Eropa. Prosedur ini dijelaskan dalam Pasal 50 Perjanjian Uni Eropa:

1. Negara Anggota manapun boleh memutuskan mencabut keanggotannya dari Uni sesuai ketentuan konstitusinya.
2. Sebuah Negara Anggota yang memutuskan keluar harus memberitahu rencananya kepada Dewan Eropa. Sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Eropa, Uni harus merundingkan dan menyepakati perjanjian dengan Negara tersebut, merumuskan rencana pencabutan keanggotaannya, mempertimbangkan kerangka kerja hubungan masa depannya dengan Uni. Perjanjian tersebut harus dirundingkan sesuai Pasal 218 (3) Perjanjian Fungsi Uni Eropa. Perjanjian ini harus disepakati atas nama Uni oleh Dewan yang bertindak di bawah mayoritas suara setelah diketahui oleh Parlemen Eropa.
3. Perjanjian ini tidak berlaku lagi bagi Negara bersangkutan sejak perjanjian pencabutan keanggotaan diberlakukan atau, apabila gagal, dua tahun setelah pemberitahuan pada paragraf kedua, kecuali apabila Dewan Eropa,

atas sepengetahuan Negara Anggota bersangkutan, memutuskan dengan suara bulat untuk memperpanjang periode tersebut.

Anggota UE yang tersisa harus melakukan negosiasi perubahan anggaran Uni Eropa, alokasi suara, dan kebijakan akibat pencabutan keanggotaan sebuah negara. (Government H. , 2016, hal. 8 )

Gambar 3.1 Steps to UK leaving The European Union



Sumber: <http://www.bbc.com/news/world-europe-36632579>

### C. Referendum Inggris Tahun 1975

Diselenggarakannya referendum merupakan hasil dari ketentuan dari Masyarakat Eropa, komponen utama yang dikenal sebagai Masyarakat



Ekonomi Eropa (MEE). Hasil referendum nasional diumumkan pada Jumat 6 Juni 1975 dan dari keempat negara dari Inggris menegaskan komitmen untuk keanggotaan lanjutan *Economic Community (Common Market)*.

Pada tahun 1975, pemerintahan Partai Buruh yang berkuasa mengadakan referendum apakah Inggris harus meninggalkan apa yang kemudian dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), cikal bakal Uni Eropa (UE). Partai Konservatif mendukung Inggris tetap pada keanggotaan Uni Eropa. Referendum yang digelar di tahun kedua keanggotaan Inggris ini, diinisiasi oleh partai Buruh atas dasar beberapa evaluasi pro dan kontra keanggotaan Uni Eropa sejak awal bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa di tahun 1973. Dan saat itu, referendum menghasilkan kemenangan bagi pendukung yang menginginkan Inggris tetap berada di MEE dengan persentase 67% berbanding 33% dengan jumlah pemilih 64,5%. (Berlianto, 2016). Keadaan domestik Inggris pada saat itu isu imigran yang datang masih cenderung sedikit. Pada tahun 1975, imigrasi hampir muncul sebagai isu. Data menunjukkan bahwa sekitar 41.000 orang meninggalkan Inggris. Karena pada saat itu perekonomian di kawasan Eropa lebih maju dibandingkan negara Inggris ditambah dengan krisis minyak yang terjadi pada tahun 1973 (Acharya, 2016).

Gambar 3.2 Hasil Referendum pertama yang digelar Inggris pada tahun 1975

United Kingdom European Community (Common Market) membership referendum, 1975		
Choice	Votes	%
✓ Yes	17,378,581	67.23
No	8,470,073	32.77
Valid votes	25,848,654	99.79
Invalid or blank votes	54,540	0.59
Total votes	25,903,194	100.00
Registered voters and turnout	40,456,877	64.03



Sebagian besar masyarakat yang memilih untuk mendukung keanggotaan *European Community* berasal dari kalangan menengah dan menengah ke atas. Pesan kampanye mengenai manfaat ekonomi yang ditujukan kepada kalangan

petani dan bisnis pun secara efektif mampu menambah suara dukungan dari kalangan Konservatif pedesaan. Hasil referendum 1975 merupakan bukti keberhasilan kampanye yang dijalankan oleh pemerintah dan kubu pro Eropa

Kontroversi mengenai integrasi Inggris diantara kubu pro dan kontra di Inggris kembali memuncak ketika Uni Eropa mengajukan program pembentukan mata uang bersama (*single currency*) yang dibentuk melalui EMU (*Economic Monetary Union*). Kontroversi mengenai integrasi Eropa sebelumnya terbagi menjadi kelompok pro Eropa dan anti Eropa. Kelompok anti Eropa tidak hanya melakukan kritik terhadap kebijakan Uni Eropa namun juga mengajukan tuntutan untuk mengeluarkan Inggris dari keanggotaan Uni Eropa. Kontroversi yang terjadi ketika EMU (*Economic Monetary Union*) atau euro muncul mendorong pembentukan kelompok baru. Kelompok ini secara tegas menolak syarat konvergensi yang ada di dalam EMU (*Economic Monetary Union*) dan menolak pengadopsian euro untuk menggantikan poundsterling namun tidak memiliki keinginan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

#### **D. Referendum Inggris Tahun 2016**

Referendum terakhir yang digelar Inggris pada tahun 2016 merupakan referendum tidak mengikat yang dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Juni 2016, di Britania Raya dan Gibraltar dan bertujuan menggalang dukungan kelanjutan keanggotaan negara tersebut di Uni Eropa.

Pemungutan suara dilaksanakan pukul 07.00 BST hingga 22.00 BST (06.00 hingga 21.00 BST di Gibraltar) di 41.000 tempat pemungutan suara di 382 daerah pemilihan. Setiap TPS dibatasi untuk menerima 2.500 pemilih. Referendum akan dilaksanakan di empat negara di Britania Raya, ditambah Gibraltar, dengan sistem suara mayoritas tunggal. 382 daerah pemilihan dikelompokkan ke dalam dua belas provinsi. Setiap provinsi akan mengumumkan hasilnya masing-masing. Pelaksanaan referendum di Inggris ini juga dilatarbelakangi pada tahun 2015 Perdana Menteri Inggris David Cameron menjanjikan akan mengadakan referendum saat berkampanye.

Di Inggris, 326 distrik akan dijadikan daerah pemilihan, hasilnya dikelompokkan ke dalam sembilan provinsi. Di Skotlandia, daerah pilihannya berupa 52 dewan daerah, hasilnya disatukan ke jumlah akhir nasional Skotlandia. Di Wales, 22 dewan daerah akan dijadikan daerah pemilihan; hasilnya disatukan ke jumlah akhir nasional Wales. Irlandia Utara menjadi satu daerah pemilihan dan daerah penghitungan, namun hasil berdasarkan wilayah konstituensi parlementer Westminster akan diumumkan juga. Gibraltar menjadi satu daerah pemilihan; hasilnya digabung dengan jumlah akhir provinsi Inggris Barat Daya.

*Gambar 3.3 Pembagian daerah pemilihan dan daerah penghitungan dalam referendum 2016*

NEGARA	DAERAH PENGHITUNGAN DAN PEMILIHAN
Britania Raya	Deklarasi referendum; 12 daerah penghitungan;

	382 daerah pemilihan
--	----------------------

<b>NEGARA KONSTITUEN</b>	<b>DAERAH PENGHITUNGAN DAN PEMILIHAN</b>
Inggris	9 daerah penghitungan; 326 daerah pemilihan
Irlandia Utara	Daerah pemilihan dan penghitungan nasional 18 daerah penghitungan lokal
Skotlandia	Daerah penghitungan nasional; 32 daerah pemilihan
Wales	Daerah penghitungan nasional; 22 daerah pemilihan

<b>Wilayah Sebrang laut Britania</b>	<b>Daerah Pemilihan</b>
Glibarartar	Daerah pemilihan tunggal (daerah penghitungan: Inggris Barat Daya)

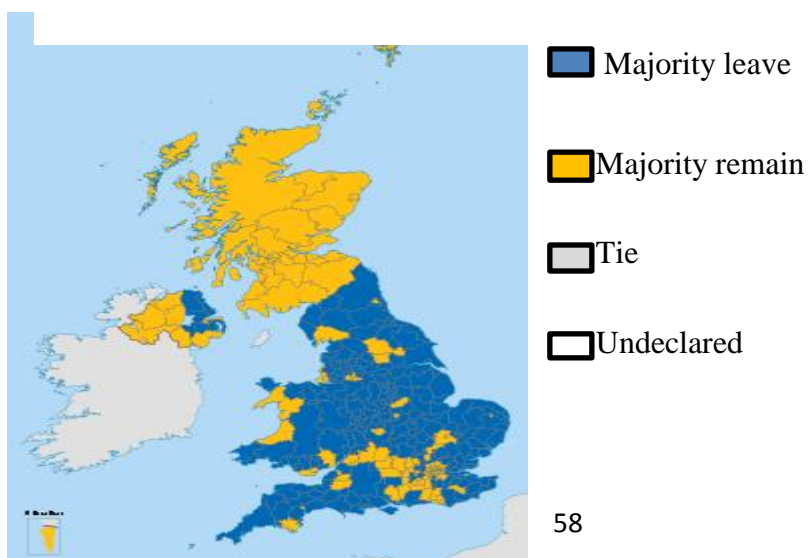
Hasil referendum menyatakan bahwa Britania Raya memutuskan keluar dari UE dengan 51,9% suara Keluar dan 48,1% suara Bertahan tetapi hasilnya membelah posisi negara-negara konstituen Britania

Raya Inggris dan Wales memilih keluar, namun Skotlandia dan Irlandia Utara memilih bertahan. Membandingkan referendum tahun 1975 dan 2016 juga menunjukkan fundamental politik Inggris telah berubah dari tahun ke tahun. Referendum Inggris di tahun 2016 ini digelar atas dasar inisiasi Perdana Menteri yang menjabat pada saat itu yakni David Cameeron yang merupakan pemimpin partai konservatif mendukung Inggris untuk tetap dalam keanggotaan Uni Eropa.

Pada referendum terakhir pada tanggal 23 Juni 2016 menghasilkan keputusan sebagai berikut:

*Gambar 3.4 Result UK votes to the UE*

Keterangan gambar:



Hasil referendum dari berbagai negara konstituen:

<b>Negara konstituen</b>	<b>Tetap UE</b>	<b>Meninggalkan UE</b>
Inggris	46,6%	53,4%
Irlandia Utara	55,8%	44,2%
Skotlandia	62,2%	38,0%
Wales	47,5%	52,5%

*Sumber: BBC News Result of Eu Referendum*

Sesuai dengan komitmen manifesto Partai Konservatif, dasar hukum penyelenggaraan referendum ditetapkan oleh Parlemen Britania Raya melalui Undang-Undang Referendum Uni Eropa 2015.

Sementara sekitar 48,1% suara memilih untuk tetap pada referendum yang digelar 2016 lalu, Perdana Menteri Inggris David Cameron serta 16 anggota Parlemen mendukung Inggris tetap menjadi anggota Uni Eropa. Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, serta beberapa negara anggota lain seperti Perancis dan Jerman juga mendukung Inggris untuk tidak meninggalkan Uni Eropa, dengan alasan ekonomi. Meskipun, Inggris harus membayar iuran keanggotaan setiap tahunnya, namun Inggris juga mendapat berbagai kemudahan dalam menjual barang dan jasa yang dihasilkan ke negara anggota lain. Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya penerapan tarif untuk transaksi sesama anggota. Akan

berbeda halnya jika Inggris bukan lagi anggota Uni Eropa. Setiap transaksi dengan negara anggota akan dikenakan tarif, sama seperti transaksi dengan negara-negara non-Uni Eropa. Hal ini dianggap dapat menghambat laju perekonomian Inggris.

Di sisi lain, imigran yang datang ke Eropa yang kebanyakan adalah masyarakat Timur Tengah justru dapat menjadi tenaga kerja yang menggerakkan perekonomian. Hal ini juga berdampak terhadap pemasukan negara karena, nantinya para imigran akan menjadi pembayar pajak di Inggris.

#### **E. Kebijakan Inggris Pasca Keluar Dari Uni Eropa**

Hampir setengah abad lamanya, Inggris telah lama menjadi anggota dalam Uni Eropa. Selama keanggotaan tersebut Inggris mencoba untuk mengevaluasi bergabungnya Inggris pada Uni Eropa dari berbagai evaluasi sektor mulai dari ekonomi, politik dan lain sebagainya. Evaluasi kinerja Uni Eropa juga menimbulkan perdebatan dari berbagai pihak *pro-Brexit* dan *pro-UE*. Pertentangan politisi domestik *pro-Brexit* dan *pro-Uni Eropa* semakin mengerucut hingga sekarang ini.

Terlebih lagi ketika posisi perdana Menteri David Cameron mundur dan digantikan oleh Perdana Menteri baru pada tanggal 13 Juli 2016 yang lalu oleh Theresa May (Feridha, 2016). Theresa May adalah seorang Perdana Menteri Britania Raya dan sekaligus ketua Partai Konservatif sejak Juli 2016 lalu. May menjanjikan Inggris akan tetap sukses pasca-Brexit. Setelah resmi menjabat



sebagai Perdana Menteri perempuan kedua, Theresa May memiliki tugas besar, tugas tersebut antara lain:

1. Membentuk pemerintahan baru

Perdana Menteri Inggris yang baru Theresa May, menyiapkan kabinet dalam pemerintahannya (re-shuffle) kabinet untuk menghadapi negosiasi setelah keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa atau Britain Exit (Brexit). Salah satu yang mendapat posisi penting tersebut adalah mantan Wali Kota London yakni Boris Johnson. Boris Johnson ditunjuk sebagai menteri luar negeri Inggris.

2. Merundingkan keluarnya Inggris dari Uni Eropa

Setelah pengajuan artikel 50 Perjanjian Lisbon 2009, Inggris harus menegosiasi keanggotaannya pada Uni Eropa selama dua tahun. Selama masa transisi tersebut, ke-27 negara anggota Uni Eropa harus meyetujui negosiasi tersebut. Jika tidak ada persetujuan untuk memperpanjang negosiasi, maka Perjanjian Uni Eropa tidak lagi berlaku bagi Inggris

3. Mengurus sektor perdagangan, perekonomian

Keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa sudah terhitung sejak lama, perdagangan dan perekonomian pun menjadai tergantung terhadap organisasi kawasan ini. Inggris harus menerima konsekuensi apa saja yang didapat setelah nantinya benar-benar lepas dari Hegemoni Uni Eropa. Sehingga, pasca referendum tersebut tak ada halangan yang berarti untuk Inggris memajukan perekonomiannya lebih maju dan independen.

#### 4. Mengurus masalah imigran

Meski kesiapan dalam menerima imigran sedikit mengalami kesulitan, migrasi memiliki dampak positif pada ekonomi Inggris. Sejak tahun 2000 telah imigran berasal dari Uni Eropa telah menyumbang lebih dari 20 miliar pound untuk UK keuangan publik antara 2001 dan di tahun 2011 Uni Eropa migran menyumbang 64% pajak negara Inggris. Sebagai perbandingan, Imigran berasal dari Negara Non-Uni Eropa telah memberikan kontribusi sekitar 5 miliar pound untuk keuangan Inggris dalam periode yang sama. Berbeda dengan hal tersebut, pemerintah Inggris juga dituntut dalam kesiapan menerima migran dalam skala yang besar, karena permasalahan migran bukan merupakan permasalahan yang sepele menyangkut kehidupan bermasyarakat warga Negara Inggris, seperti penyediaan lapangan kerja yang memadai, fasilitas umum negara, keamanan dan lain sebagainya.

#### 5. Menyatukan partainya Partai Konservatif juga rakyat Inggris yang terpecah saat referendum Brexit.

Kondisi masyarakat domestik Inggris juga partai Konservatif selama bergulirnya isu *Brexit* terpecah membagi dua kubu yang berbeda antara pro-Uni Eropa dan pro-Brexit. Perpecahan ini kemudian menjadi pekerjaan rumah Perdana Menteri baru Theresa May, karena apabila tidak segera disatukan maka akan rentan terjadinya perpecahan masalah pada domestik rakyat Inggris. Sementara pada partai Konservatif, yang saat sebelum diadakannya referendum Inggris 2015, David Cameron adalah

pemimpin partai konservatif sudah selama hampir 11 tahun. Saat Cameron masuk ke dalam bursa Perdana Menteri Inggris enam tahun lalu, ia ingin hadir sebagai sosok muda dengan pemikiran liberal terbuka, sosialis, dan juga modern.. Cameron berhasil menciptakan opini publik terkait dengan referendum Inggris selanjutnya. Menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri dikarenakan hasil *voting* pada referendum 2016 dan kemudian kedudukannya sebagai Perdana Menteri berhasil digantikan oleh Theresa May. Theresa May yang juga berasal dari partai konservatif. Pada dasarnya, partai konservatif merupakan partai yang Pro-Uni Eropa, akan tetapi perbedaan cara pandang para anggotanya menyebabkan segregasi di dalam tubuh partai tersebut.

Tidak akan ada yang pernah memastikan seberapa panjang proses artikel 50 Uni Eropa, mengingat hal tersebut beberapa menganggap bahwa hal tersebut menimbulkan situasi ketidakpastian terlebih untuk investor.

Dari kategori usia diambil dari hasil *voting* masyarakat, ada perbedaan signifikan antara pemilih bertahan dan keluar dari Uni Eropa. Tujuh di antara 10 pemilih muda ingin bertahan di Uni Eropa. Lebih jelasnya, sekitar 64% pemilih antara usia 18-24 tahun memilih bertahan, sementara 58% pemilih di atas usia 65 ingin keluar dari Uni Eropa. Para pemilih di antara rentang usia tersebut terbelah dua di angka yang hampir seimbang, namun dengan kecenderungan yang hampir sama dengan data di atas (Ismail, 2016). Beberapa alasan kuat yang mendukung pemilih tua untuk tetap pada argumen untuk meninggalkan Uni Eropa antara lain Inggris ingin lepas dari hegemoni Uni Eropa, menjadi negara berdaulat yang

mandiri atau bahkan negara superpower seperti sejarah perang dunia. Sementara itu, dari pemerintah Inggris Raya sendiri menginginkan Inggris tetap dalam Uni Eropa.

Hasil referendum memang menunjukkan penduduk Inggris ingin keluar dari Uni Eropa. Akan tetapi berbagai negosiasi antara kedua pihak harus dijalani untuk menentukan berbagai hal yang terjadi di masa depan. Salah satunya adalah untuk memisahkan perekonomian Inggris dan Uni Eropa yang saat ini sudah terikat. Proses ini dapat memakan waktu 2 tahun bahkan lebih. Selama masa negosiasi ini, Inggris masih dianggap negara anggota Uni Eropa. Maka dapat diartikan bahwa, Inggris masih harus mematuhi segala peraturan dan perjanjian keanggotaan, namun tidak berhak untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan kembali.